



PEDOMAN HAK ASASI MANUSIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19



The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
diterjemahkan oleh Lokataru Foundation (April 2020)

Diterbitkan oleh:

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Geneva, Switzerland.
Telephone: +41 22 917 9220
Email: InfoDesk@ohchr.org

Twitter: UNHumanRights
Instagram: unitednationshumanrights
Facebook: United Nations Human Rights
Youtube: UN Human Rights

Dirilis pada:

20 April 2020

Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh:

Lokataru Foundation, Adytio Nugroho

Tata Letak oleh:

Yoyo Wardoyo

Versi asli dalam Bahasa Inggris dapat diunduh di tautan berikut:

https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf

Lokataru Foundation

Jl. Balai Pustaka 1 No.14, Jakarta 13220
Telp: 021-22474143
Fax: 021-22868539
Email: lokatarufoundation@gmail.com

Instagram: lokataru_indonesia
Twitter: lokataru_id
Facebook: Lokataru Law and Human Rights Office
Youtube: Lokataru Foundation



Pedoman Hak Asasi Manusia Di Tengah Pandemi COVID-19

Sejak diumumkan sebagai sebuah pandemi, wabah Coronavirus (COVID-19) telah menjadi tantangan global. Badan Organisasi Kesehatan Dunia telah dengan rinci menjabarkan bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Tentunya hal ini menjadi tantangan tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat, komunitas, dan individu. Perlu adanya solidaritas dan kerja sama untuk mengatasi penyebaran virus dan mengurangi dampaknya sekecil mungkin.

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengeluarkan pedoman¹ hak asasi manusia yang perlu dipenuhi di tengah berbagai situasi yang terjadi saat pandemi COVID-19. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia di seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi dan sosial, dan hak sipil dan politik, akan menjadi fundamental bagi keberhasilan respon kesehatan masyarakat dan pemulihan pandemi.

Akses Pelayanan Kesehatan

- Strategi kesehatan saat pandemi tidak hanya diperlukan untuk mengatasi sektor medis saja, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dan konsekuensi setiap kebijakan kesehatan yang diambil pada gender tertentu.
- Perawatan harus tersedia untuk semua orang tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. Hal ini berarti dengan memastikan tidak ada seorang pun yang ditolak karena masalah biaya atau stigma yang menghalangi mereka mendapatkan perawatan.

¹ Pedoman diakses dari situs OHCHR pada 21 April 2020.

Tindakan Darurat

- Hukum internasional memungkinkan tindakan darurat dalam menghadapi ancaman yang signifikan - tetapi tindakan tersebut harus sebanding dengan analisis risiko, kebutuhan, dan tidak diskriminatif. Berarti tindakan darurat harus memiliki fokus dan durasi yang jelas, serta mengambil pendekatan yang paling sedikit risikonya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.
- Ketika negara mendeklarasikan kondisi darurat, negara harus memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan notifikasi formal kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai aturan yang berlaku.
- Sehubungan dengan COVID-19, tenaga darurat harus digunakan untuk tujuan utama kesehatan masyarakat. Tenaga darurat tidak digunakan sebagai dasar untuk meredam perbedaan pendapat atau membungkam kerja para pembela hak asasi manusia atau jurnalis. Beberapa hak yang tidak bisa dihilangkan diantaranya, prinsip non-refoulement (larangan pengusiran kolektif), larangan penyiksaan dan perlakuan buruk, penahanan sewenang-wenang, dan lain-lain.
- Pemerintah harus mengumumkan kepada publik yang terkena dampak mengenai maksud dari keadaan darurat, lokasi dan durasi diberlakukan tindakan tersebut, serta memperbarui informasi tersebut secara berkala
- Ketika krisis berlalu, penting bagi pemerintah untuk mengembalikan kondisi seperti sebelumnya dan tidak menggunakan kekuatan darurat untuk mengatur kehidupan sehari-sehari pasca krisis.

Tidak Diskriminatif

- Semua masyarakat, termasuk orang-orang yang terpinggirkan dan yang memiliki kesulitan mengakses informasi dan layanan publik karena berbagai alasan, beberapa diantaranya mencerminkan diskriminasi dan perbedaan politik yang mengakar. Upaya penyebaran informasi dan respon terhadap COVID-19 memerlukan perhatian khusus untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin berisiko terlewatkan dan dikecualikan, seperti etnis atau agama minoritas, masyarakat adat, migran, orang terlantar dan pengungsi, lanjut

usia (lansia), penyandang disabilitas, LGBTI atau orang-orang yang terkena dampak kemiskinan ekstrem.

- Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dan masyarakat sipil dapat membantu dalam mengidentifikasi orang-orang yang rentan terlewatkan atau dikecualikan, menyalurkan aliran informasi kepada komunitas-komunitas ini, dan memberikan umpan balik kepada pihak berwenang mengenai dampak tindakan yang diambil terhadap masyarakat tersebut.

Perumahan

- Karena orang-orang diminta untuk tinggal di rumah, sangat penting bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah mendesak untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki perumahan yang layak atau memadai. Kebijakan untuk tetap di rumah dan melakukan *social distancing* bisa sangat sulit bagi sebagian orang, misalnya, orang yang tinggal di kawasan padat penduduk, tunawisma, dan mereka yang kesulitan mengakses air bersih dan sanitasi.
- Langkah praktik untuk menangani warga yang tinggal di perumahan tidak layak dan para tunawisma bisa dengan menyediakan perumahan darurat (menggunakan unit rumah kosong atau terbengkalai, penyediaan sewa tempat jangka pendek) dengan menyediakan layanan dan panduan isolasi mandiri bagi mereka yang menunjukkan gejala terinfeksi virus.
- Pihak berwenang harus berhati-hati untuk mencegah peningkatan jumlah tunawisma, misalnya ketika warga menghadapi resiko pengusiran karena kehilangan penghasilan membuat mereka tidak dapat membayar sewa. Kebijakan seperti pemberhentian sementara pengusiran atau penangguhan pembayaran sewa sebaiknya diberlakukan.
- Tidak ada yang harus dihukum karena mereka tunawisma atau tinggal di perumahan yang tidak memadai untuk menjalankan kebijakan pencegahan COVID-19.

Penyandang Disabilitas

- Langkah-langkah untuk menahan laju penyebaran virus, seperti *physical distancing* dan isolasi mandiri, perlu mempertimbangkan kebutuhan orang-orang yang mengandalkan dukungan orang lain untuk beraktifitas seperti makan, berpakaian, dan mandi.
- Banyak orang, termasuk para penyandang disabilitas, mengandalkan layanan tempat tinggal dan komunitas. Layanan-layanan ini harus mendukung dalam meminimalkan risiko

terinfeksi. Negara harus menerapkan langkah-langkah tambahan untuk menjamin keberlangsungan dukungan ini bagi para penyandang disabilitas selama krisis. Jika kebijakan pembatasan pergerakan menghalangi keluarga dan jaringan dukungan sosial yang ada, maka pemerintah harus memastikan ada layanan lain sebagai pengganti.

- Akses pada bantuan keuangan akan sangat penting bagi para penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Beberapa mungkin kekurangan sumber daya untuk persediaan makanan dan obat-obatan atau membayar paket pengiriman.

Lanjut Usia

- Lansia memiliki hak yang sama dengan kelompok umur lainnya, dan mereka harus dilindungi secara adil selama pandemi. Penanganan khusus harus diberikan pada risiko ancaman tertentu yang dihadapi oleh lansia, seperti terabaikan akibat isolasi dan *physical distancing* serta diskriminasi berdasarkan usia pada akses perawatan medis juga dukungan lainnya. Protokol tentang triase harus didasarkan pada bukti ilmiah dan kebutuhan medis.

Tahanan

- Orang-orang yang terampas kebebasannya seperti di penjara, penahanan pra-persidangan, penahanan imigrasi, lembaga dan tempat penahanan lainnya berisiko tinggi terinfeksi saat pandemi. Kebijakan pencegahan seperti *social distancing* tentu sulit dilakukan. Situasi mereka harus secara khusus ditangani dalam perencanaan dan respon pada krisis.
- Pemerintah harus mengambil langkah khusus guna memastikan akses informasi, pencegahan, dan perawatan kesehatan lainnya untuk para tahanan serta membuat opsi pembebasan dan alternatif penahanan demi mengurangi risiko bahaya di tempat-tempat penahanan.
- Penyandang disabilitas dan lansia yang tinggal di tahanan akan sangat berisiko. Membatasi kontak dengan keluarga dapat dilakukan sebagai bagian dari langkah pencegahan darurat. Tetapi hal tersebut lebih jauh dapat mengakibatkan mereka merasa diabaikan dan tersiksa.

Partisipasi dan Informasi

- Informasi yang relevan terkait pandemi dan pencegahan COVID-19 harus menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Ini berarti penyediaan informasi harus tersedia dalam format dan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk bahasa nasional dan daerah, menjangkau etnis dan agama minoritas, menyesuaikan informasi dengan mereka yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra dan tunarungu, dapat menjangkau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca atau mengakses informasi karena tidak memiliki akses internet.
- Akses internet sangat penting untuk memastikan bahwa informasi menjangkau mereka yang terdampak oleh virus. Pemerintah harus mengakhiri pembatasan internet dan memastikan aksesnya seluas mungkin, serta mengambil langkah untuk menjembatani kesenjangan digital.
- Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menjadi terbuka dan transparan serta melibatkan mereka yang terkena dampak dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam langkah-langkah yang dirancang demi melindungi kesehatan mereka dan populasi yang lebih luas.
- Para tenaga medis profesional dan pakar yang relevan, termasuk para ilmuwan, harus dapat berbicara dan berbagi informasi secara bebas dengan masyarakat. Upaya bersama harus dilakukan di tingkat internasional dan nasional untuk melawan informasi menyesatkan yang dapat memicu rasa takut dan prasangka.
- Menyamakan perspektif, suara, dan pengetahuan perempuan dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi sangat penting termasuk memastikan keterwakilan dan peran kepemimpinan mereka secara global, regional, dan nasional di tengah pandemi.

Stigma, Xenofobia, dan Rasisme

- Pandemi COVID-19 telah memunculkan banyak stigma, diskriminasi, rasisme, dan xenofobia pada warga negara dan kelompok etnis tertentu. Perlu kerja sama untuk melawan tren tersebut dengan menyebut wabah ini sebagai COVID-19 dibanding mengacu pada wilayah geografis tertentu.
- Para tokoh politik dan tokoh berpengaruh lainnya harus bersuara lantang menentang stigma dan rasisme yang diakibatkan oleh krisis ini serta tidak menyulut adanya

diskriminasi. Negara harus bertindak cepat untuk melawan hasutan yang memicu ketakutan serta memastikan respon pada pandemi COVID-19 ini tidak membuat kelompok tertentu lebih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

- Penyebaran informasi yang akurat, jelas, dan berbasiskan pada bukti serta kampanye peningkatan kesadaran adalah alat paling efektif untuk melawan diskriminasi dan xenofobia. Beberapa memanfaatkan disinformasi dan ketakutan. Upaya tambahan diperlukan untuk memantau insiden diskriminasi dan xenofobia yang terjadi, dan tanggapan terhadap insiden apapun harus cepat dan dipublikasikan dengan baik.

Migran dan Pengungsi

- Migran dan pengungsi, termasuk pengungsi internal (*internally displaced persons*), menghadapi risiko tertentu di kala pandemi karena keterbatasan fasilitas di pengungsian dan pemukiman. Atau tempat tinggal di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk, sanitasi yang buruk, dan akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau akibat padatnya pengungsi.
- Migran dan pengungsi sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk hambatan bahasa dan budaya, biaya, kurangnya akses informasi, diskriminasi dan xenofobia. Migran dalam situasi seperti ini bisa jadi tidak bisa atau enggan mengakses perawatan kesehatan dan memberikan informasi tentang kesehatan mereka karena berisiko penahanan, deportasi atau hukuman dengan statusnya sebagai imigran.
- Negara harus mengambil tindakan spesifik untuk memasukan migran, orang terlantar, dan pengungsi ke dalam pencegahan dan respons wabah COVID-19 dengan memastikan akses yang sama pada informasi, tes, dan perawatan kesehatan untuk mereka terlepas dari statusnya, dan membedakan proses penegakan imigrasi dengan pemenuhan hak mereka agar tidak menghambat akses kesehatan dan layanan penting lainnya.
- Dukungan internasional sangat dibutuhkan untuk membantu negara penampung dalam meningkatkan pelayanan bagi migran, pengungsi, dan komunitas lokal. Mereka harus dimasukan dalam upaya pencegahan nasional. Jika tidak, hal tersebut akan membahayakan mereka dan berisiko meningkatkan kebencian dan stigma. Langkah khusus juga harus diambil untuk melawan kebencian dan xenofobia yang ditujukan pada mereka.
- Penting juga bahwa setiap pengetatan kontrol perbatasan, pembatasan perjalanan atau kebijakan pembatasan kebebasan beraktivitas tidak mencegah orang yang mungkin

melarikan diri dari perang, penyiksaan, atau mereka yang berhak mendapat perlindungan hak asasi manusia untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

- Hak atas pendidikan perlu dilindungi ketika sekolah ditutup, misalnya, jika dimungkinkan melalui kelas pembelajaran *online*. Peluang pendidikan yang terbatas bagi mereka yang tidak memiliki akses internet berisiko memperdalam ketidaksetaraan dan kemiskinan.
- Skema perlindungan sosial harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dikarenakan kerentanan tinggi yang mereka hadapi yang disebabkan tahap awal perkembangan fisik, intelektual dan emosional mereka. Praktik terbaik meliputi pemberian bantuan tunai yang diarahkan pada keluarga dengan anak-anak.
- Kebijakan yang baik dari pemerintah, sektor publik dan swasta, organisasi internasional dan nasional untuk mengurangi dampak negatif pada sosial ekonomi dari krisis ini harus dilakukan bersama-sama.
- Kesehatan dan keselamatan mereka yang bekerja selama krisis ini, terutama pekerja kesehatan, harus diperhitungkan dan ditingkatkan. Tidak ada yang harus merasa dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak perlu dan berisiko membahayakan kesehatan mereka karena takut kehilangan pekerjaan atau gaji.
- Paket stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang ditujukan langsung kepada mereka yang paling tidak mampu mengatasi krisis sangat penting untuk mengurangi konsekuensi pandemi yang lebih buruk. Langkah bantuan ekonomi yang cepat tanggap seperti jaminan cuti sakit yang dibayar, tunjangan pengangguran diperpanjang, distribusi makanan, dan penghasilan dasar universal dapat terpenuhi dapat membantu melindungi dampak akut dari krisis.

Pangan

- Krisis COVID-19 berpotensi melemahkan ketahanan pangan karena pembatasan gerak dan kelangkaan alat pelindung mempengaruhi pekerja pertanian yang banyak diantaranya adalah migran. Langkah sigap untuk memastikan mobilitas dan kondisi kerja yang aman dari pekerja pertanian harus dilakukan untuk mengamankan produksi pangan, seperti dukungan keuangan dan akses kredit untuk petani skala kecil, terutama perempuan.

- Diperlukan langkah sigap untuk mengatasi kerawanan pangan ini bagi kelompok populasi yang paling miskin dan terpinggirkan. Langkah tersebut utamanya ditujukan untuk memberikan dukungan langsung guna memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pemberian bantuan makanan dan gizi.

Privasi

- Pengawasan dan pemantauan kesehatan khusus yang mencakup serangkaian alat pelacak dan pemantau dari perilaku dan pergerakan individu harus digunakan untuk tujuan utama demi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dibatasi baik jangka waktu dan jangkauannya sesuai keperluan pemantauan. Jaminan perlindungan yang kuat harus dilakukan guna memastikan tindakan tersebut tidak disalahgunakan oleh pemerintah maupun perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang sifatnya pribadi untuk tujuan lain di luar krisis kesehatan masyarakat.

Anak-Anak

- Meskipun anak-anak terlihat memiliki lebih sedikit gejala dan tingkat kematian yang lebih rendah dibanding kelompok lanjut, risiko terhadap perlindungan anak dapat muncul sebagai dampak atau hasil dari tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada kebutuhan perlindungan dan hak-hak anak ketika merencanakan dan mengimplementasikan respons terhadap pandemi dan rencana pemulihan mereka. Kepentingan bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama dan dasar atas respons yang dilakukan.
- Pandemi telah menghambat hak atas pendidikan bagi lebih dari 1,5 miliar anak di seluruh dunia karena 188 negara telah memberlakukan penutupan sekolah di seluruh negeri.
- Karantina wilayah dan himbauan untuk tetap di rumah juga dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental anak-anak. Terkurung di rumah dapat membuat anak-anak lebih berisiko terhadap kekerasan, termasuk penganiayaan dan kekerasan seksual. Maka, layanan dukungan dan tempat penampungan untuk anak-anak yang berisiko ini perlu diprioritaskan.
- Jutaan anak menghadapi kemiskinan karena anggota keluarga yang sakit atau tidak dapat bekerja. Ada anak-anak dalam situasi yang rentan, seperti mereka yang hidup di jalanan, anak-anak migran dan pengungsi, anak-anak korban perdagangan atau penyelundupan,

anak-anak yang hidup di zona konflik, dan anak-anak penyandang cacat memiliki risiko khusus.

Gender

- Perempuan cenderung memiliki tambahan peran sebagai pengasuh/ perawat di rumah. Posisi ini rentan mengakibatkan mereka tertekan dan berpotensi meningkatkan risiko infeksi. Di seluruh dunia, 70 persen perempuan merupakan tenaga kesehatan, termasuk bidan, perawat, apoteker, dan petugas kesehatan masyarakat di garis depan, yang meningkatkan risiko infeksi. Diperlukan langkah khusus yang utamanya mengatasi dampak krisis yang rentan terhadap perempuan.
- Di banyak negara, perempuan kerap menghadapi risiko yang tidak berimbang di sektor pekerjaan. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal seperti sebagai asisten rumah tangga, pengasuh, petani atau menjalankan bisnis keluarga. Di tengah pandemi, mereka mungkin menjadi yang pertama kehilangan pekerjaan akibat konsekuensi dari krisis ini. Belum lagi pekerjaan sektor informal yang tidak memiliki jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau cuti berbayar. Kondisi tersebut semakin membatasi kemampuan mereka untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan.
- Lansia perempuan lebih berpotensi hidup dalam kemiskinan atau bergantung pada dana pensiun yang pas pasan. Hal ini bisa memperburuk dampak dari pandemi karena keterbatasan mereka mengakses barang, makanan, air, informasi, dan layanan kesehatan.
- Langkah kesehatan masyarakat yang sifatnya terbatas, termasuk karantina, dapat meningkatkan peluang terjadinya kekerasan, baik kekerasan dari pasangan maupun kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, layanan dan tempat berlindung yang aman bagi korban kekerasan berbasis gender perlu diprioritaskan untuk menjamin ketersediaan akses keselamatan bagi para korban. Informasi mengenai *hotline* dan layanan *online* harus dimasukkan dalam setiap wacana terkait COVID-19.
- Layanan kesehatan seksual dan reproduksi harus dilihat sebagai prioritas bagi keselamatan jiwa dan menjadi bagian dari strategi pencegahan dengan jalur rujukan yang jelas. Upaya harus dilakukan dengan tidak mengalihkan sumber daya utama layanan kesehatan seksual dan reproduksi karena akan berdampak pada hak dan keselamatan jiwa, khususnya perempuan.

- Kelompok LGBTI juga menghadapi risiko tinggi terinfeksi selama pandemi. Langkah khusus mesti dimasukkan dalam agenda kebijakan untuk mengatasi dampak krisis. Data yang tersedia menunjukkan bahwa LGBTI lebih cenderung bekerja di sektor informal. Namun, mereka juga memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Layanan kesehatan bagi mereka harus tetap tersedia selama krisis ini, termasuk pengobatan dan pengujian HIV.
- Pemerintah harus mengatasi disinformasi yang memicu stigma dan diskriminasi pada kelompok LGBTI, termasuk narasi yang menyalahkan mereka atas terjadinya pandemi.

Air dan Sanitasi

- Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih adalah pencegahan pertama dalam melawan COVID-19. Namun, terdapat 2,2 miliar orang yang tidak memiliki akses air bersih. Memastikan kebutuhan populasi yang rentan terpenuhi, termasuk yang tidak memiliki akses memadai pada air bersih, menjadi penting untuk memastikan keberhasilan dalam perjuangan global melawan COVID-19.
- Langkah sigap yang dapat dilakukan dengan melarang memutus pasokan air bagi mereka yang tidak dapat membayar tagihan serta menyediakan pasokan air bersih gratis selama krisis bagi kelompok miskin dan mereka yang terkena dampak kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Masyarakat Adat

- Negara harus mempertimbangkan konsep kesehatan masyarakat adat yang khas, seperti obat tradisional mereka, konsultasi, meninjau, dan mempertimbangkan persetujuan atas dasar informasi awal dari masyarakat adat dalam pengembangan strategi pencegahan COVID-19.
- Negara harus menempatkan langkah-langkah untuk mengontrol atau membatasi masuknya seseorang ke wilayah adat dalam konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat yang bersangkutan, khususnya dengan kelompok perwakilan mereka.
- Bagi masyarakat adat yang memang hidup dengan melakukan isolasi secara sukarela, maka negara dan pihak lain harus menganggap mereka sebagai kelompok rentan. Penjagaan untuk mencegah orang luar masuk ke wilayah mereka ini harus diterapkan secara ketat guna menghindari berbagai kontak.

Minoritas

- Negara harus menerapkan langkah tambahan untuk mengatasi dampak yang tidak proporsional dari krisis kesehatan akibat COVID-19 yang mungkin diderita kaum minoritas karena daerah yang terpencil atau daerah yang memiliki keterbatasan barang pokok dan jasa. Kelompok minoritas sering hidup dalam kondisi perumahan yang terlalu padat sehingga membuat upaya jaga jarak fisik dan isolasi mandiri lebih sulit. Keterbatasan akses digital dan kesenjangan pendidikan orang tua juga membuat aktivitas belajar di rumah menjadi lebih sulit.
- Orang yang termasuk kelompok minoritas mungkin lebih besar kemungkinannya dikeluarkan dari perawatan kesehatan karena kekurangan sumber daya, tidak memiliki dokumentasi resmi, atau karena stigma dan diskriminasi. Negara harus memastikan akses perawatan kesehatan kelompok minoritas, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau dokumen identitas.

Sanksi internasional dan Unilateral

- Komunitas internasional harus mengadvokasi pencabutan, atau setidaknya penangguhan, dari semua sanksi yang menghambat dan menghilangkan kapabilitas untuk memerangi pandemi COVID-19 secara efektif dan akses pada kebutuhan medis yang vital.
- Pemerintah yang menerapkan sanksi didesak untuk segera meninjau dan menarik langkah-langkah yang dapat menghambat upaya negara untuk merespons pandemi COVID-19, seperti sanksi yang dapat mencegah atau menghambat pembiayaan pembelian dan pengiriman obat-obatan, peralatan medis, barang-barang penting lainnya, serta menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan.

